

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang termasuk sebagai negara berkembang. Sebagai Negara berkembang Indonesia menyadari akan arti penting pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi dan sosialnya. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara yang sudah maju. Untuk mewujudkan suatu Negara yang maju maka harus disertai adanya target untuk mencapai kehidupan pada suatu kondisi yang dianggap lebih baik. Di Negara Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chaizi, 1995:16). Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang paling tua di Indonesia. Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau

penyerahan wajib in natura oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari para penguasa tersebut. Yang menjadi objek pungutan adalah harta milik yang paling berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian (R.Sa'ban, 2006: 4).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Dalam rangka untuk menjaring wajib pajak ataupun untuk melakukan ekstensifikasi jumlah wajib pajak ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Pajak selaku unit pelaksana, yaitu melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak.

Didalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ketentuan mengenai pendaftaran objek dan subjek pajak tercantum dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak”*.

Sesuai ketentuan tersebut maka subjek pajak yang memiliki/menguasai/memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan wajib hukumnya untuk mendaftarkan objek pajaknya termasuk jati dirinya dengan jalan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peran dari subjek pajak lebih dominan dari pada peran aparat pajak (fiskus). Bagi subjek pajak yang memiliki/menguasai bangunan, maka disamping mengisi formulir SPOP

juga harus mengisi formulir Lampiran SPOP (LSPOP) yang berisikan data/karakteristik bangunan yang dimiliki/dikuasainya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tugas akhir ini mengambil judul **“PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR DAN LAPANGAN PADA POS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KANTOR CABANG DPKAD KOTA SEMARANG”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimana prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor?
2. Bagaimana prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian lapangan?
3. Apa saja permasalahan dalam pendataan objek pajak baru pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Agar penulisan Tugas Akhir ini mempunyai arah dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor.
2. Untuk mengetahui prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor.
3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada pelaksanaan pendataan objek pajak baru PBB.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis terutama yang berhubungan dengan prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terhadap masalah yang terjadi di lapangan maupun di lingkungan kerja.

2. Bagi Akademik

- a. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi perkuliahan yang diperoleh dari kegiatan kuliah kerja praktik pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang.
- b. Menumbuhkan kerjasama dan menjalin jenjang komunikasi intelektual dengan instansi pemerintah.

3. Bagi Instansi

- a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- b. Instansi dapat mewujudkan masukan akademis dalam memperbaiki kekurangan yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.

4. Bagi Pihak lain

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dalam penulisan tugas akhir selanjutnya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Dermawan Wibisono, 2013:51). Penulis memperoleh data melalui dokumen dari Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah 1 Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historis (Dermawan Wibisono, 2013:154). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

a. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian (Marzuki, 2005). Penulis mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan laporan. Pertanyaan yang diajukan mengenai tentang prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang

dibahas. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara garis besar mengenai tugas akhir. Dalam penyusunan tugas akhir ini sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang Sejarah DPKAD Kota Semarang, Visi dan Misi DPKAD Kota Semarang, Bagan Organisasi DPKAD Kota Semarang, Tugas Pokok dan fungsi DPKAD Kota Semarang, Sasaran DPKAD, Lokasi dan Wilayah Kerja DPKAD Kota Semarang.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENDATAAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU

Bab ini berisi tentang definisi pajak bumi dan bangunan, dasar hukum PBB, objek subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan PBB, prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, kemudian juga akan dibahas praktik prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kantor

cabang DPKAD Kota Semarang dan permasalahan dalam pendataan objek pajak baru.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang terkait dengan prosedur pendataan objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kantor cabang DPKAD Kota Semarang.